

Imlek dan Sejarah Bangsa

KEBEBASAN merayakan Imlek sekarang ini tak dapat lepas dari sejarah. Tionghoa di Indonesia memiliki kisah unik yang pada kurun waktu tertentu sempat dilanda praktik diskriminasi. Meski demikian tak berarti berbicara soal Tionghoa melalui perkutut pada rentetan aturan dan kebijakan diskriminatif pada masa lalu. Termasuk pula soal larangan merayakan Imlek pada masa Orde Baru. Jika hal itu yang terus ditekankan maka niscaya etnis Tionghoa senantiasa dipandang sebagai korban.

Untuk itu butuh perspektif baru dalam mengkajinya. Keberadaan Tionghoa dalam relasi sosial di masyarakat dewasa ini perlu dipandang sebagai bagian dari keharmonisan bersama yang sejatinya sudah dihidupi sejak dulu. Salah satu tokoh nasional yang menaruh perhatian terhadap upaya ini ialah Gus Dur. Beliau dengan tegas menolak persepsi bahwa Tionghoa merupakan *foreign subject* atau *outsider*. Menurut keharmonisan yang masih terus diupayakan sesungguhnya telah dihidupi oleh nenek moyang di zaman Nusantara.

Kenyataan sejarah menyimpan catatan bahwa Tionghoa telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sepele. Wawasan pluralisme sudah dihayati oleh bangsa Indonesia sejak masa lampau. Buktinya semboyan Binneka Tunggal Ika kali pertama muncul pada zaman Majapahit sebagaimana tersurat dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Ketika itu komunitas Tionghoa telah menjadi bagian dari masyarakat Nusantara.

Dalam penyebaran Islam, Tionghoa ikut ambil peranan. Kelenteng Sam Poo Kong yang berdiri gagah di Semarang atau Masjid Cheng Ho

yang belum lama ini didirikan di Surabaya menjadi buktinya. Laksamana Cheng Ho, seorang muslim saleh dari Suku Hui dalam pelayarannya ke Nusantara tidak semata-mata untuk urusan perdagangan dan politik negaranya. Laksamana Cheng Ho membawa serta pengikutnya yang sebagian memutuskan tinggal di pesisir pantai Jawa dan Sumatera. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan turut membangun perkampungan muslim Tionghoa. Keberadaan baju koko yang menjadi khas muslim, beduk di masjid, hingga petasan dan ketupat sayur saat Idul Fitri juga tak lepas dari anasir Tionghoa.

Pada masa kolonialisme, orang-orang Tionghoa bergabung dalam laskar koalisi Tionghoa-Jawa pimpinan Kapitan Sepanjang (Khe Panjang alias Tay Wan Soey) melawan dominasi Belanda tahun 1740-1743. Pada tahun 1742 juga melebur perlawanan serupa terhadap VOC di Tegal yang dipimpin oleh Kwee Lak Kwa.

Hal ini bukan isapan jempol. Bahkan untuk mengenang kepahlawanannya didirikan Kelenteng Tek Hay Kiong di Tegal dan Kelenteng Tek Hay Blo di Gang Pinggir, Semarang. Kedua kelenteng ini menghormati Kwee Lak Kwa atau Kongco Tek Hay Cin Jin yang diangkat sebagai dewa asli dari Indonesia.

Memasuki masa pergerakan juga berdiri Partai Tionghoa Indonesia pimpinan Liem Koen Hian. Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 selain digelar di rumah seorang Tionghoa, Sie Kong Liong, juga

dihadiri empat orang pemuda Tionghoa. Demikian pula saat persiapan kemerdekaan, beberapa tokoh Tionghoa turut didapuk menjadi anggota BPUPK maupun PPKI. Rumah Djauw Kie Siong di Rengasdengklok juga menjadi saksi bisu saat Soekarno-Hatta dijauhkan dari pengaruh Jepang oleh para pemuda menjelang Proklamasi.

Hadirnya Tionghoa dalam setiap lintas masa perjalanan sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa kemajemukan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Keberagaman yang ada merupakan

rahmat yang telah digariskan oleh Tuhan. Menolak kemajemukan berarti mengingkari pemberian Illahi. Gus Dur memandang perbedaan sebagai *ethic of dignity*. Sebagai karunia Tuhan, Gus Dur optimis bahwa kemajemukan tidak akan memecah belah namun justru akan membawa manfaat bagi bangsa.

Sejak sebelum menjadi presiden, Gus Dur telah menaruh perhatian pada orang-orang yang termarginalkan termasuk Tionghoa. Gus Dur pernah membela Budi Wijaya dan Lanny Gulto, pasangan pengantin beragama Konghucu yang ditolak pencatatan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Surabaya. Polemik ini kelak mendorong pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama kenam sehingga kebebasan bagi para pemeluknya untuk beribadah lebih terjamin.

Tidak sampai di situ saja, kala Tionghoa ditempatkan sebagai

economic animal, Gus Dur menganjurkan agar orang Tionghoa dapat memiliki akses dalam semua bidang kehidupan tanpa pembatasan. Saat menjadi presiden, Gus Dur mengakomodasi keresahan masyarakat Tionghoa yang merasa terpinggirkan. Bahkan Gus Dur berani menyatakan bahwa dalam dirinya mengalir darah Tionghoa bermarga Tan. Inilah cara Gus Dur menabur keharmonisan sebagai bentuk *nation building* Indonesia.

Kini masyarakat umum pun, sebagian besar, telah mafhum dan dapat menerima kehadiran Tionghoa dalam berbagai lini kehidupan. Budaya Tionghoa bebas tampil dan menghibur semua kalangan di berbagai tempat secara terbuka. Hampir tiap kota besar menggelar festival maupun acara lainnya untuk merayakan Imlek secara meriah. *Best practice* semacam ini menjadi indikator tumbuhnya keharmonisan masyarakat multikultural dan harus terus dikembangkan di tengah krisis persatuan dewasa ini.

Kemajemukan harus menjadi kesadaran kolektif yang dipelihara dan bukan dimatikan. Caranya selain melalui pertemuan budaya, diperlukan pula edukasi sejarah. Masyarakat perlu sadar bahwa Tionghoa merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup bangsa. Maka akan lebih baik jika Tionghoa tak hanya menjadi berita muslim saat Imlek tiba. Dalam dunia pendidikan, peran Tionghoa dalam sejarah bangsa pun mesti disampaikan secara jujur dan berimbang. Hal ini penting agar gairah kebangsaan yang harmonis terus disemai di kalangan generasi muda. Selamat Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili. Xin Nian Kuai Le! (*)



HENDRA KURNIAWAN, M.PD
DOSEN PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS
SANATA DHARMA YOGYAKARTA, MENEKUNI
KAJIAN SEJARAH TIONGHOA